



PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SUKATANI KABUPATEN GARUT

Miman Nurdiaman¹; Ade Purnawan²; Regina Fia Lestari Sudirman³

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
mnurdiaman@fisip.uniga.ac.id

² Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
ade.purnawan@fisip.uniga.ac.id

ABSTRAK

The process of infrastructure development planning in Sukatani Village, Cisurupan Subdistrict, Garut Regency in 2019 is in accordance with applicable regulations, namely Minister of Domestic Affairs Regulation No. 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development, where planning is carried out starting from hamlet compound, village consultation and village development planning deliberations. The purpose of this study was to determine how the process of infrastructure development planning in Sukatani Village, Cisurupan District, Garut Regency and its inhibiting factors. Researchers used qualitative research methods. In the selection of informants purposively. The techniques used by researchers in data collection are interviews, observation and documentation with interactive analysis techniques. The results showed that in the village development planning stage the Sukatani village government focused on the construction of village roads and environmental roads as a means of public transportation, with consideration that these were in line with the priorities and needs of the Sukatani Village community. In the planning process found inhibiting factors, namely the absence of community self-help funds, lack of socialization of implementation and the village government did not involve the community in deciding the priority of infrastructure development needed by the community, causing a lack of participation in the implementation of infrastructure development. The advice that can be raised by Sukatani Village Government is to intensively socialize the Village Government Work Plan (RKP) and its financing budget through a website-based village information system, village information boards, and other media according to village conditions. Sukatani Village Government should involve the community in determining the priorities of infrastructure development so that the community knows clearly the reasons for determining the priorities for infrastructure development. Providing understanding to the community that the Village Fund is only an incentive or stimulus to increase community participation..

Keywords: *infrastructure, development planning process*

1 Pendahuluan

Pemerintah Desa Sukatani dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya infrastruktur desa. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat desa yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan pedesaan dapat dilihat dari terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat desa, terlebih saat ini dengan adanya penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN) yang prioritas penggunaannya diutamakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat (Akbar, Hermawan, et al., 2019; Kodoatie, 2008).

Saat ini program yang menjadi perhatian pemerintah Desa Sukatani adalah pembangunan infrastruktur desa yang meliputi perbaikan jalan lingkungan dan jalan desa sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang menjadi sarana transportasi darat utama di Desa Sukatani belum memadai, salah satunya terlihat dari kondisi jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui (Fahri, 2016). Saat ini pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Sukatani mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Sukatani tahun anggaran 2019.

Tabel 1.1
Rencana Kerja Pembangunan Infrastruktur Desa Sukatani Tahun 2019

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber Dana |
|----|---|---------------|-------------|
| 1 | Pembangunan jalan setapak RT 01 dan RT 02 RW 01 | 27.000.000 | DD, swadaya |
| 2 | Pembangunan jalan setapak RT 03 RW 02 | 39.000.000 | DD, swadaya |
| 3 | Pembangunan jalan setapak RT 03 RW 01 | 37.000.000 | DD, swadaya |
| 4 | Pembangunan jalan setapak Rt 01 RW 02 | 21.000.000 | DD, swadaya |
| 5 | Pembangunan jalan setapak RT 02 RW 02 | 37.000.000 | DD, swadaya |
| 6 | Pembangunan jalan setapak RW 03 | 25.000.000 | DD, swadaya |
| 7 | Pembangunan jalan setapak RW 04 | 37.000.000 | DD, swadaya |
| 8 | Pembangunan jalan setapak RW 05 | 15.000.000 | DD, swadaya |
| 9 | Pembangunan jalan setapak RT 04 RW 06 | 27.000.000 | DD, swadaya |
| 10 | Pembangunan jalan setapak RT 01 RW 07 | 25.000.000 | DD, swadaya |
| 11 | Pembangunan Poskamling RW 05 | 21.000.000 | DD, swadaya |
| 12 | Pembangunan Poskamling RW 06 | 18.000.000 | DD, swadaya |
| 13 | Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW 04 | 18.000.000 | DD, swadaya |
| 14 | Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW 06 | 21.000.000 | DD, swadaya |
| 15 | Pembangunan Gorong-gorong RT 02 RW 06 | 12.000.000 | DD, swadaya |

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber Dana |
|--------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| 16 | Pembangunan Gorong-gorong RT 01 RW 03 | 12.000.000 | DD, swadaya |
| 17 | Pembangunan Paud RW 05 | 15.000.000 | DD, swadaya |
| 18 | Pembangunan Paud RW 06 | 10.000.000 | DD, swadaya |
| Jumlah | | 420.000.000 | DD, swadaya |

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Sukatani, 2019

Pada tabel 1.1 dapat dilihat pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukatani pada Tahun 2019 terdapat 18 jenis rencana pembangunan infrastruktur dengan nilai sebesar Rp. 420.000.000 dengan dana yang berasal dari Dana Desa dan swadaya masyarakat sementara di bawah ini dapat dilihat realisasi perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Realisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Sukatani Tahun 2019

| No | Uraian kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber Dana |
|--------|---|---------------|-------------|
| 1 | Pembangunan jalan setapak RT 01 dan RT 02 RW 01 | 27.000.000 | DD |
| 2 | Pembangunan jalan setapak RT 03 RW 01 | 37.000.000 | DD |
| 3 | Pembangunan jalan setapak Rt 01 RW 02 | 21.000.000 | DD |
| 4 | Pembangunan jalan setapak RW 04 | 41.000.000 | DD |
| 5 | Pembangunan jalan setapak RW 05 | 15.000.000 | DD |
| 6 | Pembangunan Poskamling RW 05 | 21.000.000 | DD |
| 7 | Pembangunan Poskamling RW 06 | 18.000.000 | DD |
| 8 | Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW 04 | 18.000.000 | DD |
| 9 | Pembangunan Tembok Penahan Tanah RW 06 | 21.000.000 | DD |
| 10 | Gorong-gorong RT 02 RW 06 | 12.000.000 | DD |
| 11 | Gorong-gorong RT 01 RW 03 | 12.000.000 | DD |
| Jumlah | | 243.000.000 | DD |

Sumber: Daftar Rincian Kegiatan Pembangunan Desa Sukatani, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa tidak seluruh rencana yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Infrastruktur Desa Sukatani tahun 2019 dapat dilaksanakan ada beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak dapat direalisasikan, diantaranya adalah:

- a. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sukatani menyebutkan belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sukatani, disebabkan pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan dana. Dana untuk pembangunan di Desa Sukatani tahun anggaran 2019 menggunakan Dana Desa sebesar Rp 243.000.000 tidak ada dana dari swadaya masyarakat.
- b. Seperti yang tercantum dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 59 menjelaskan, Kepala Desa menginformasikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sukatani hanya sebatas penginformasian satu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada dusun yang bersangkutan saja. Hal inilah yang menyebabkan

masyarakat tidak mengetahui isi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dan Anggaran Pendapatan Desa (APD) Desa Sukatani sehingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendanaan maupun dalam pelaksanaan.

- c. Menurut hasil wawancara dengan Ketua Dusun I diketahui bahwa dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tidak melibatkan masyarakat dalam memutuskan prioritas pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, selama ini penentuan prioritas kebutuhan infrastruktur untuk diajukan pada Musrenbang tingkat kecamatan di tentukan oleh pemerintah desa sehingga hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Sehubungan dengan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian mengenai proses perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut yang peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sukatani Kabupaten Garut”**.

2 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif (Ramdhani & Ramdhani, 2016). Metode ini digunakan agar peneliti dapat mengungkapkan secara komprehensif bagaimana proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut tahun 2019. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peneliti untuk menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut tahun anggaran 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015;247-253) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Kuriawan et al., 2019; Ramdhani & Ramdhani, 2014).

3 Hasil dan Implikasi

Berikut peneliti uraikan proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:

a. Musyawarah Dusun

Pemerintah Desa Sukatani sampai saat ini terus memaksimalkan pembangunannya. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah desa adalah di bidang infrastruktur terutama perbaikan jalan lingkungan dan jalan desa sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sukatani diawali dengan musyawarah dusun. Pendekatan bottom-up planning dapat dilihat pada mekanisme musyawarah yang dilaksanakan mulai dari musyawarah dusun, untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun. Model perencanaan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak dari awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakan (Aziz, 2016). Dari musyawarah dusun yang dilakukan setiap bulan April diajukan gagasan pembangunan dari tiap dusun di Desa Sukatani.

b. Musyawarah Desa

Perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Juliasih & Pasciana, 2020; Khaerudin, 2012).

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus bersifat jangka panjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Sumaryadi, 2010). Musyawarah desa dilakukan dengan matang melalui serangkaian tahapan-tahapan, dimulai dari penyusunan perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh BPD sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, kemudian membentuk tim penyusun yang melaksanakan kegiatan seperti pencermatan pagu indikatif yang berkaitan dengan rencana pendanaan serta penyesuaian program/ kegiatan masuk ke desa. Selain itu tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa. Langkah selanjutnya adalah mengajukan usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa kemudian kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyetujui rancangan RKP desa (Akbar, Hermawan, et al., 2019; Akbar, Kania, et al., 2019).

c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam tahap musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa di Desa Sukatani kehadiran masyarakat masih kurang. Banyak masyarakat yang tidak tahu waktu pelaksanaan Musrenbangdes karena sosialisasi pemerintah desa mengenai waktu pelaksanaan Musrenbangdes sangat kurang sehingga belum terlihat ada usaha yang lebih dari pihak-pihak desa untuk melibatkan masyarakat dalam Musrenbangdes, dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat (Rustiana et al., 2019; Suseno et al., 2017).

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa secara umum proses pembangunan infrastruktur di Desa Sukatani sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana dilakukan perencanaan mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam tahap perencanaan pembangunan desa tersebut pemerintah Desa Sukatani memfokuskan pada pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan sebagai sarana transportasi masyarakat dengan pertimbangan hal tersebut sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat Desa Sukatani. Dalam proses perencanaan ditemukan faktor penghambat yaitu tidak adanya dana swadaya masyarakat, kurangnya sosialisasi pelaksanaan dan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam memutuskan prioritas pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

5 Rekomendasi

- a. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan hendaknya Pemerintah Desa Sukatani secara intensif mensosialisasikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa berikut anggaran pembiayaannya. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui sistem informasi desa berbasis *website*, papan informasi desa, dan media lain sesuai kondisi desa.
- b. Pemerintah Desa Sukatani hendaknya melibatkan masyarakat dalam penentuan prioritas pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas alasan penentuan prioritas pembangunan infrastruktur tersebut. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Dana Desa hanya merupakan perangsang atau stimulus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i2.40>
- Akbar, G. G., Kania, I., Ulumudin, A., & Ramdhani, A. (2019). Coordination Poverty Alleviation Program, an Analysis Based on Instrumental and Institutional Perspective. *The International Seminar Series on Regional Dynamics Proceeding*, 75–87. <https://doi.org/10.19184/issrd.v1i1.13720>
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Fahri, L. N. (2016). *Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap Manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektifitas program Pembangunan desa*. Universitas Garut.
- Juliasih, L., & Pasciana, R. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus di Kawasan Situ Bagendit). *Seminar Nasional “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Daerah,”* 164–172.
- Khaerudin. (2012). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Kodoatie, R. (2008). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar.
- Kuriawan, W. A., Alamanda, D. T., Ramdhani, A., & Akbar, G. G. (2019). *Modul Praktika Komputer II*. Universitas Garut.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basics and Applied Sciences*.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2016). *Penelitian Pemasaran* (1st ed.). Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Rustiana, E., Kania, I., Ramdhani, A., & Cupiadi, H. (2019). The Impact of Public Service Quality on Holidays towards Visitors’s Satisfaction. *First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, 80–84.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Citra Utama.
- Suseno, N. S., Salamah, U., Pundenswari, P., & Ainissyifa, H. (2017). The Implementation of Human Resources Development Policy to Increase Employee’s Performance. *Medwell Journals*, 11, 966.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Panduan Penulisan Skripsi. 2015. Uniga: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.